



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH II PALEMBANG**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

PALEMBANG, 10 JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang tahun penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis BPKH Wilayah II tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Planologi Kehutanan Tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat gambaran secara garis besar kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2025 selama satu tahun.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun anggaran dan kegiatan tahun 2025 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah II Palembang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja 2025 BPKH Wilayah II Palembang. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup BPKH Wilayah II Palembang sebagaimana mestinya, serta mendapatkan ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, Januari 2025

Kepala Balai,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc

NIP. 19741024 200003 1 001



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I.	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Tujuan	2
2.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	2
2.1.1. Kedudukan	2
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
3.1. 1. Struktur Organisasi	3
3.2.2. Sumber Daya Manusia.....	6
3.2.3. Pengarusutamaan	6
BAB II.....	9
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024.....	9
2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024...9	
2.1.1. Rencana Pencapaian Target Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....9	
2.2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2023 dan TAHUN 2024 . 11	
BAB III.....	15
RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	15
3.1. STRATEGI DALAM Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup DAN Kehutanan dan Program Prioritas Nasional	15
3.2. SASARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2025	16
BAB IV.	18
PENUTUP	18
BAB V.	18
LAMPIRAN.....	18

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah II Palembang.	6

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Sasaran Program dan Kegiatan Planologi Kehutanan Tahun 2025	1
Tabel 2. Program dan Sasaran Pengarusutamaan <i>Gender</i> BPKH Wilayah II Palembang	8
Tabel 3. Rencana Pencapaian Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah II Palembang.....	9
Tabel 4. Rencana Pencapaian Kegiatan Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah II Palembang.....	10
Tabel 5. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.....	12
Tabel 6. Rencana dan Anggaran Kegiatan Tahun 2023 DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang	16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Renja BPKH Wilayah II Tahun 2025 merupakan perencanaan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan, baik yang berasal dari anggaran DIPA BPKH Wilayah II Tahun 2025 maupun pelayanan lainnya. Dengan demikian, BPKH Wilayah II selaku penanggung jawab kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatan yang holistik, integratif, tematik dan secara spasial dapat dipertanggungjawabkan karena dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran telah terintegrasi dengan sistematis.

Renja BPKH Wilayah II Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPKH Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2025.

Tabel 1. Sasaran Program dan Kegiatan Planologi Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Seluruh Kawasan Hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (Penetapan kawasan hutan 100%)
	Tersedianya data dan informasi SDH	Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 provinsi
	Terkendalinya penggunaan KH	Presentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Ketahanan Pangan, energy dan Air
	Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi	Tata kelola yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

Di sisi lain, reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Salah satu kebijakan Reformasi Struktural ditandai dengan peningkatan kualitas reformasi birokrasi baik dalam hal peningkatan layanan birokrasi, sumber daya manusia (SDM), sistem pemerintahan berbasis elektronik, kualitas kelola pengadaan barang dan jasa dan implementasi kebijakan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Kerja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2025 akan menggunakan prinsip *money follows program*. Kaitannya dengan itu, Renja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari program prioritas nasional, program prioritas kementerian/lembaga, dan program prioritas bidang yang merupakan penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PKTL Tahun 2025-2029; Renstra BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2025-2029; dan Renja Direktorat Jenderal PKTL 2025.

Dengan demikian, penyusunan Renja BPKH II Palembang tidak terlepas dari sistem

aplikasi *e-planning* KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang ditetapkan pemerintah dalam menyusun dokumen Renja KLHK dan Renja Direktorat Jenderal PKTL Tahun 2025. Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2025 antara lain berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja tersebut disusun berdasarkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja yang merupakan semangat dalam menyusun Renja KLHK & Dirjen PKTL Tahun 2025. BPKH Wilayah II Palembang selaku penanggung jawab kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatan yang holistik, integratif, tematik dan secara spasial dapat dipertanggungjawabkan.

1.1.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun anggaran dan kerangka pelaksanaan kegiatan sehingga terarah, terpola dan bersinergi dengan rencana lainnya;
- b. Memberikan arahan, pedoman dalam menyusun rencana detail pelaksanaan kegiatan.

2.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

2.1.1. Kedudukan

BPKH Wilayah II Palembang adalah instansi pemerintah yang merupakan unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (DitJen PKTL) sesuai dengan SK.173/Menlhk-II/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan unit induk organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang berkedudukan di Palembang.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

BPKH Wilayah II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang dimandatkan oleh KLHK dan Direktorat Jenderal PKTL sebagai Eselon I. Tugas dan fungsi yang dikerjakan oleh BPKH Wilayah II Palembang, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan . Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH Wilayah II Palembang memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKH Wilayah II Palembang menyelenggarakan 14 (Empat Belas) fungsi, antara lain (1) Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan; (2) Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; (4) Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; (5) Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; (6) Pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan ; (7) Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; (8) Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; (9) Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup; (10) Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (11) Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; (12) Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; (13) Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; (14) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

3.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1.1. Struktur Organisasi

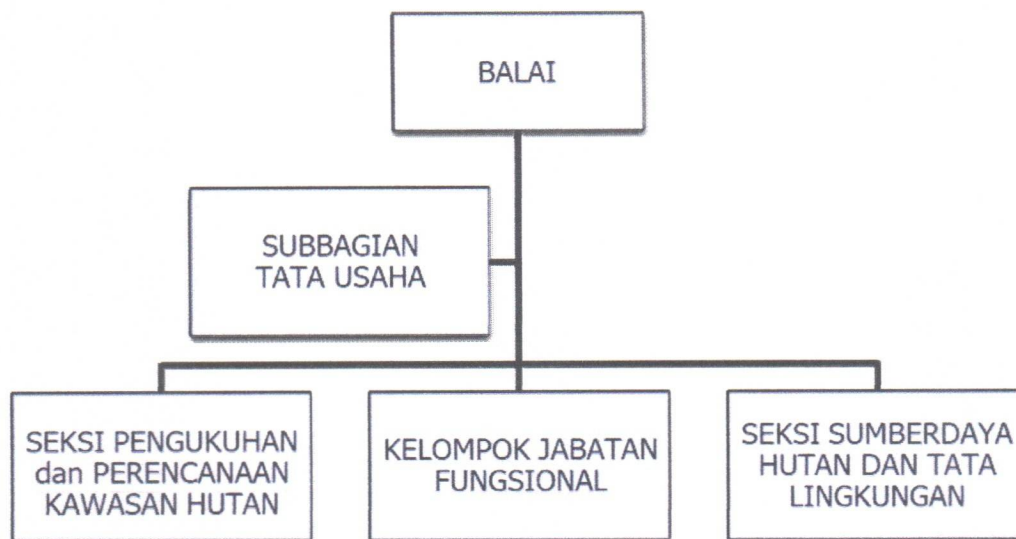
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH Palembang memiliki 3 (tiga) Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi;
- b. **Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- c. **Seksi Sumber Daya Hutan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan ; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup

tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;

- d. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Selanjutnya fungsi-fungsi tersebut terstruktur dalam tata hubungan kerja sebagaimana Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah II Palembang.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai BPKH Wilayah II Tahun 2024 adalah 41 orang, yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Berdasarkan golongan, ada 3 orang Golongan IV, 23 orang Golongan III, dan 9 orang Golongan II. Berdasarkan tingkat pendidikan (seluruh pegawai), 6 orang S2, 27 orang S1, 9 orang D3, dan 16 orang SLTA/SMK. Sedangkan sarana dan prasarana (barang inventaris dan aset tetap lainnya) yang dimiliki BPKHTL Wilayah II Palembang per 31 Desember 2024 senilai Rp. 76.006.538.434, berupa : tanah 10.824 m2 nilai buku 72.481.067.000, peralatan dan mesin 638 unit nilai buku 7.987.583.745, gedung dan bangunan 8 unit nilai buku 4.572.694.000. Asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 194 unit dengan nilai Rp. - 42.147.266.3.2.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan adalah upaya atau strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan yang berperan mendukung kinerja BPKH Wilayah II Palembang adalah :

a. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya yang merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pranata sosial di masyarakat sebagai pengeluaran nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan.

b. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*) pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Pengarusutamaan dalam Renja 2025 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra yang dijabarkan dalam Renstra KLHK 2025-2029 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan yang inovatif dan adaptif. Kebijakan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan akses, kesempatan, partisipasi dan manfaat bagi perempuan. Adapun strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan keselarasan dan keadilan melalui aspirasi. Dalam renja Ditjen PKTL tahun 2025 dijelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategis untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penjabaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia yang diupayakan dengan strategi yaitu : 1) Mengurangi dan kesenjangan antara laki - laki dan perempuan dalam mengakses dalam mengontrol sumber daya, 2) Berpartisipasi proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan, 3) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender*. 4) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender.

Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang yang dapat diimplementasikan sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 melalui Perencanaan dan penganggaran.

Laporan implementasi PUG ini dapat memberikan gambaran tentang pencapaian hasil dan masalah yang dihadapi oleh kaum wanita sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang. Disamping itu, laporan ini juga bermaksud agar dapat memperlihatkan terkait perjalanan dan perkembangan Pengarusutamaan (PUG) yang disusun sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi landasan dalam penerapan strategi Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan berisi tahap perencanaan dan Penggaran Gender, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Indonesia, Bagi K/L untuk melakukan analisis gender dan mengalokasikan anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (ARG), kemudian dituangkan dalam *statement* menyatakan permintaan anggaran.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang meliputi :

- a. Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan
- b. Pengarusutamaan Pelayanan
- c. Pengarusutamaan Pengembangan SDM
- d. Sarana dan Prasarana.

Sasaran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan Wilayah II adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatkan kapasitas Gender
- c. Pengarusutamaan Gender yang efektif dan efisien

Dari ketiga sasaran Pengarusutamaan Gender tersebut diturunkan ke dalam sasaran Pengarusutamaan Gender pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang sebagaimana matrik sebagai berikut;

Tabel 2. Program dan Sasaran Pengarusutamaan *Gender* BPKH Wilayah II Palembang

No.	Program	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1.	Komitmen Pimpinan	1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender. 2. Pembentukan Sub Kelompok Pengarusutamaan Gender
2.	Pendataan	Pendataan terpilah pengarusutamaan Gender
3.	<i>Gender analysis Pathway</i>	1. Menyusun panduan dan pedoman pengarusutamaan gender 2. Menganalisa program kegiatan
4.	Kegiatan komunikasi edukasi dan informasi	1. Meningkatkan dan pemahaman pengarusutamaan Gender. 2. Menumbuhkan informasi PUG
5.	Kebijakan Reponsif Gender	Menerapkan aturan dan intruksi sesuai SOP Pengarusutamaan Gender
6.	Sarana Prasarana	Meningkatkan kebutuhan fasilitas pengarusutamaan Gender
7.	<i>Road Map</i> PUG.	Menyusun panduan implementasi PUG sesuai dengan Rencana Kerja TIM

BAB II.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Tahun 2023 dan tahun 2024 termasuk dalam pelaksanaan Renstra BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2020-2024. Kegiatan-kegiatan yang tertera dalam Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, *outcomes* yang diharapkan terjadi pada akhir Tahun 2024 adalah :

1. Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 148.035 Ha (3.180,97 Km) dan tata batas hutan reguler 2.940,97 Km (SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016);
2. Tersedia dan termukhtahir data dan informasi sumber daya hutan melalui pembangunan klaster enumerasi TSP/PSP sebanyak 44 Klaster dan Re- Enumerasi PSP sebanyak 15 dan hasil pemantauan SDH dengan penafsiran; dan

Capaian kinerja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2023 dan tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan dan unit kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja selama Tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1. Rencana Pencapaian Target Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Rencana capaian kinerja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2023 dan Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan dan unit kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja hingga Desember Tahun 2023 dan Tahun 2024. Prognosis capaian kinerja BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2023 dan Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 3 berdasarkan perkiraan capaian target dan realisasi unit kegiatan, yang disandingkan dengan sasaran unit kegiatan dalam perjanjian kinerja. Rencana pencapaian kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 BPKH Wilayah II Palembang berdasarkan sasaran perjanjian kinerja yang telah disepakati adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 3. Rencana Pencapaian Kegiatan Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah II Palembang

Sasaran Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja (Renja 2023)	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan (Renja 2023)	Capaian		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target Perjanjian Kinerja	Realisasi		%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Sasaran Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja (Renja 2023)	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan (Renja 2023)	Capaian		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi %
			Target Perjanjian Kinerja	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Planologi	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Inventarisasi, Verifikasi Dan BATB Obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	Terlaksananya Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00	Target Tercapai
	Panjang Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00	Target Tercapai
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Layanan	5 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Data dan Informasi Penutupan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	6 Badan Usaha	6 Badan Usaha	100,00	Target Tercapai
	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	35 Unit	35 Unit	100,00	Target Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah II Palembang tahun 2023

Tabel 4. Rencana Pencapaian Kegiatan Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Perjanjian

Kinerja BPKH Wilayah II Palembang

Sasaran Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja (Renja 2023)	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan (Renja 2023)	Capaian		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi %
			Target Perjanjian Kinerja	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Planologi	Inventarisasi, Verifikasi Dan BATB Obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	Inventarisasi, Verifikasi Dan BATB Obyek TORA Dalam Kawasan Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Panjang Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Panjang Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00	Target Tercapai
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	4 Layanan	4 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Data dan Informasi Penutupan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	68 Badan Usaha	83 Badan Usaha	100,00	Target Tercapai
	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Target Tercapai
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	103 Unit	103 Unit	100,00	Target Tercapai

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah II Palembang tahun 2025

2.2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2023 dan TAHUN 2024

Untuk mendukung pencapaian kinerja kegiatan dan unit kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024, BPKH Wilayah II Palembang memperoleh anggaran yang bersumber dari DIPA Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-029.06.2.238535/2023 tanggal 30 Nopember 2022 dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-029.06.2.238535/2024 tanggal 24 Nopember 2023. Realisasi anggaran per-unit

kegiatan dan kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan BPKH Wilayah II Palembang dan kegiatan Eselon II serta dan program planologi kehutanan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang

Indikator	Anggaran (Rp) Tahun 2023	Realisasi		Anggaran (Rp) Tahun 2024	Realisasi	
		Jumlah	%		Jumlah	%
1	2	3		4	5	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.997.422	99,99	387.500.000	355.500.634	91,74
Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	50.000.000	49.987.150	99,97	544.500.000	469.920.517	86,30
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	150.000.000	149.990.300	99,99	5.950.030.000	5.924.870.812	99,58
Panjang Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	3.099.460.000	3.099.306.857	100,00	535.951.000	409.241.096	76,36
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	318.585.000	318.284.890	99,91	216.032.000	216.030.420	100,00
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	98.016.000	97.998.000	99,98	108.016.000	108.016.000	100,00
Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	360.000.000	359.969.033	99,99	1.490.361.000	1.337.806.311	89,76
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Layanan Perkantoran	6.051.088.000	6.043.347.967	99,87	6,282,081,000	6,281,158,139	99,99
Layanan Umum	773.900.000	773.746.116	99,98	600.000.000	599,881,564	99,98
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	764.299.000	764.249.000	99,99	1.834.822.000	1,834,798,790	100,00
Jumlah	11.715.348.000	11.706.876.735	99,93	17.949.293.000	16.937.342.719	99,97

Secara umum, seluruh kegiatan/unit kegiatan yang direncanakan oleh BPKH Wilayah II Palembang untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan tercapai 100%, Tahun ke dua dan ketiga pelaksanaan Renstra 2025-2029 terealisasi cukup berhasil karena penganggaran terhadap kegiatan/unit kegiatan pokok cukup memadai. Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (penyelesaian TORA) dapat terealisasi. Capaian keberhasilan juga di dapat dari perencanaan kawasan hutan

(verifikasi PNB-PKH). Unit-unit kegiatan lainnya seperti inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta kegiatan dukungan manajemen layanan perkantoran untuk mencapai sasaran terbangunnya good governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. Realisasi unit kegiatan-kegiatan tersebut adalah 100%.

BPKH Wilayah II Palembang sesuai dengan tupoksinya memegang peranan penting dalam penyiapan prakondisi pengelolaan hutan, terutama mempersiapkan data dan informasi dalam mengurai persoalan tersebut. Seluruh unit kegiatan yaitu tata batas kawasan hutan, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan dan inventarisasi sumberdaya hutan diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan 2024, BPKH Wilayah II Palembang tidak menemukan permasalahan yang berarti. Beberapa permasalahan yang masih ada adalah klaim-klaim penguasaan masyarakat atas sebagian kawasan hutan untuk berbagai kepentingan seperti untuk kebun/sawah masyarakat, pemukiman, maupun pengembangan desa. Sebagian besar klaim-klaim tersebut pada dasarnya telah terakomodir dalam Program Strategis Nasional (PSN) PPTKH atau TORA. Masyarakat, dalam berbagai kesempatan, telah diberikan sosialisasi dan pemahaman terkait program-program pemerintah terkait dengan Kawasan hutan seperti TORA, Perhutanan Sosial bahkan Penataan Kawasan Hutan sebagaimana yang telah tersebut dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Permasalahan tersebut bereangsur-angsur teratasi dengan beberapa program pemerintah yang berpihak pada kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan BPKH Wilayah II dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 dan Tahun 2024 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah :

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia cukup dengan kompetensi yang berkategori baik dan sangat baik;
2. Tersedianya anggaran dan waktu pelaksanaan yang cukup untuk melaksanakan dan mencapai target kegiatan yang ditetapkan;
3. Tersedianya sarana prasarana kantor dan peralatan yang memadai;
4. Koordinasi yang baik dengan semua Lembaga/institusi, baik institusi vertikal maupun horizontal, pemerintah pusat maupun daerah;
5. Penerimaan masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan yang sangat bagus terkait dengan kegiatan-kegiatan di wilayah kerja BPKH Wilayah II Palembang.

Secara khusus, kegiatan penataan batas di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan. Kegiatan ini tidak menemui permasalahan baik pada saat perencanaan maupun saat pelaksanaan dan proses penyelesaian kegiatan tersebut. Pemerintah kabupaten dan institusi provinsi menyambut baik dilaksanakannya kegiatan percepatan penyelesaian tata batas Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Selatan serta kejelasan dan kepastian status hak masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan tata batas hasil PPTKH/TORA dengan capaian kinerja 100 %.

Diharapkan dari kedua kegiatan tersebut, pengakuan atas kawasan hutan negara, kepastian hak, status dan usaha masyarakat (legalitas) dan tingkat keterpercayaan/pengakuan masyarakat (legimitasi) erhadap batas Kawasan hutan dan pengelolaan hutan di Sumatera Selatan semakin tinggi.

BAB III.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

3.1. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Tahun 2025 BPKH Wilayah II Palembang akan fokus melaksanakan Tujuan dan arah kebijakan Keplanologian Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan yang diselaraskan dengan tujuan dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2025-2029 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sedangkan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah : (1) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; (2) Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup; kelembagaan, sumberdaya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan demikian, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan tahun 2025 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Mempercepat pemantapan kawasan hutan, dengan melaksanakan inventarisasi sumberdaya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kehutanan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, tepat dan terukur; (2) Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung, daya tampung, layanan pada lingkungan, pembangunan, dan ekonomi hijau).

Berdasarkan tujuan pembangunan dan arah kebijakan KLHK serta tujuan pembangunan dan arah kebijakan Dirjen PKTL, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan dan arah kebijakan pembangunan keplanologian kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan pembangunan diarahkan menyiapkan pemantapan kawasan hutan melalui penyiapan prakondisi pembangunan untuk memastikan tata kelola kawasan hutan di tingkat tapak. Sedangkan arah kebijakannya memastikan tata kelola kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan melalui penataan batas kawasan hutan, Verifikasi PNPB, dan Inventarisasi Sumber Daya Hutan. Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut, BPKH Wilayah II Palembang akan melaksanakan kegiatan yang mendukung program Kementerian Kehutanan dan program prioritas nasional.

3.2. SASARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kegiatan BPKH Wilayah II Palembang berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal PKTL Tahun 2025-2029; Renja Direktorat Jenderal PKTL 2025; dan Renstra BPKH Wilayah II Palembang 2025-2029 terdiri dari tiga sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PKTL, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, melalui target sasaran berupa (a) Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola (target di Provinsi Sumatera Selatan 16 dokumen dan 2 Rekomendasi Kebijakan); (b) Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target 15 Badan Usaha);
2. Program Dukungan Manajemen, melalui target sasaran berupa meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPKH Wilayah II Palembang (target nilai LAKIP 85 poin).

Kegiatan, sasaran kegiatan, unit kegiatan, dan elemen kegiatan yang akan dikerjakan BPKH Wilayah II Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rencana dan Anggaran Kegiatan Tahun 2025 DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang

Kode	Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kerja	Target	Satuan	Alokasi (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5432.EBA.962	Layanan Umum	Terlaksananya Layanan Umum	1	Layanan	300.000.000
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan Perkantoran	1	Layanan	5.722.536.000
5434.BMA.002	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan dan Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Dokumen	1.150.000.000
6744.QAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	15	Badan Usaha	467.200.000
5433.PBV.005	19.824.597.000	Terlaksananya Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	18.027.397.000
Jumlah					25.199.933.000

Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas dan kebijakan prioritas pagu anggaran tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional menyebabkan target pencapaian prioritas nasional tidak dapat terpenuhi dan pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan tidak merata. Selain ketersediaan anggaran, pencapaian target

pada Rencana Kerja Tahun 2025 juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama antar instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan saling mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH Wilayah II Palembang pada tahun 2025 untuk mewujudkan Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen dalam mendukung pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

BAB IV. PENUTUP

Tujuan pengukuhan kawasan hutan dalam hal ini penetapan kawasan hutan untuk memperoleh kepastian batas, luas dan letak kawasan hutan (berkekuatan hukum tetap/legalisasi) dan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat (legitimasi) dapat tercapai dengan keberhasilan pencapaian kegiatan di Tahun 2025. Demikian juga dengan kegiatan lain semakin menguatkan tugas dan fungsi BPKH di daerah sebagai penyedia data dan informasi untuk menyiapkan prakondisi kawasan hutan bagi pembangunan kehutanan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang ini merupakan acuan utama dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan satuan kerja BPKH Wilayah II Palembang untuk mendukung tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan pelaksanaan program Planologi Kehutanan . Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Tahun 2025 tersebut juga digunakan dalam penetapan kinerja BPKH Wilayah II Palembang pada Tahun 2025.

Dengan rencana kerja yang terpola, terarah dan bersinergi dengan rencana pembangunan kehutanan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan kehutanan yaitu "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera"

BAB V. LAMPIRAN



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Menteri/Wakil Menteri Kehutanan
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat

1. Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Menteri/Wamen
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat
- Pemda

2. Pelayanan verifikasi dan penataan batas PPTKH yang andal

3. Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat

4. Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

5. Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan

6. Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

7. Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien

8. Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

LEARNING & GROWTH

9. Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan

10. Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan, S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19741024 20003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II Palembang

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan	1.1 Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	4 Dokumen

Customer Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Pelayanan verifikasi dan penataan batas PPTKH yang andal	2.1 Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH terhadap target rencana kerja	100%
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat	3.1 Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan	4.1 Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	100%

Internal Process Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	5.1 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Klaster
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	6.1 Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	9 Unit
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien	7.1 Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,51 Poin
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan	8.1 Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84,57 Poin

Learning and Growth

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan	9.1 Laporan Peningkatan dan Kapasitas sumber daya manusia	1 Dokumen
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel	10.1 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen
		10.2 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 3.611.985.000,-
1.	Pengukuhan Kawasan Hutan	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
3.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
4.	Perencanaan Kawasan Hutan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp 6.199.566.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp 9.811.551.000,-

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001


Andi Setiawan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19741024 20003 1 001

DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

1. Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan				
1.1	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	4 Dokumen	Dokumen Berita Acara Rekonstruksi Batas kawasan hutan merupakan dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan adalah suatu dokumen administratif yang digunakan untuk memastikan dan mengkonfirmasi keberadaan serta batas-batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait	Hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas dan rekonstruksi batas di lapangan.	Tahapan pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan antara lain melalui : melaksanakan orientasi batas Kawasan hutan untuk mengumpulkan data tanda batas apakah masih ada atau sudah tidak ada. Setelah data terkumpul dilakukan pembahasan dengan Panitia Tata Batas yang selanjutnya hasil rapat tersebut menjadi dasar rekonstruksi batas kawasan hutan. Setelah dilaksanakan rekonstruksi batas akan dilaksanakan pembahasan kembali oleh Panitia Tata Batas dan penandatanganan BA rekonstruksi batas

2. Customer Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
2	Pelayanan verifikasi dan penataan batas PPTKH yang andal				
2.1	Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH terhadap target rencana kerja	100 %	Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH menggambarkan sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan penataan batas kawasan hutan yang telah dilepaskan atau diubah peruntukannya melalui PPTKH		Untuk menghitung Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH, perlu ditetapkan target jumlah unit kerja yang direncanakan untuk diverifikasi dan ditata batasnya dalam rencana kerja. Realisasi: Jumlah unit kerja yang benar-benar sudah diverifikasi dan ditata hingga periode evaluasi. Persentase realisasi = realisasi aktual dibagi target rencana kerja, dikalikan 100%.
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat				
3.1	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk	1 Dokumen	Penafsiran citra satelit resolusi sedang merupakan proses analisis citra satelit	Data penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Tahapan pelaksanaan kegiatan penafsiran Citra Resolusi Sedang dan pengecekan

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	update data penutupan lahan tingkat nasional		dengan resolusi sedang untuk memperbarui informasi mengenai penggunaan atau penutupan lahan di tingkat nasional. Proses ini melibatkan penggunaan citra satelit untuk mengidentifikasi jenis penutupan lahan yang ada, seperti hutan, lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan lahan lainnya, serta memperbarui data terkait status dan perubahan penutupan lahan dari waktu ke waktu.	berupa sumber data Penutupan Lahan 2024, data hasil pengecekan lapangan, serta data citra landsat tahun 2025. Data pendukung lainnya seperti kawasan hutan, Peta PIPPIB, data mangrove, data rehabilitasi hutan, dan data lainnya yang dikoordinir dan dibagi oleh Direktorat IPSDH	lapangan dalam rangka update data penutupan lahan tingkat nasional antara lain meliputi : kegiatan pengumpulan data pendukung dan penyediaan bahan dan peralatan (mozaik citra Landsat, juknis penafsiran citra satelit resolusi sedang, pembuatan instruksi kerja pengecekan lapangan, pembuatan SK Tim Penafsir, pembuatan peta kerja, penyiapan peralatan dan bahan dan pembuatan titik sampel pengecekan lapangan.
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan				
4.1	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan penggunaan kawasan hutan diselesaikan tepat waktu	100%	Layanan publik yang transparan dalam konteks perizinan penggunaan kawasan hutan adalah proses pemberian izin kepada individu, badan usaha, atau instansi pemerintah untuk memanfaatkan kawasan hutan yang dilakukan secara terbuka, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik diskriminatif atau korupsi. Persentase ini menunjukkan seberapa banyak proses perizinan penggunaan kawasan hutan yang Diselesaikan sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan,		Persentase layanan publik yang transparan dan diselesaikan tepat waktu = rasio jumlah izin yang selesai sesuai target waktu terhadap total permohonan, dikalikan 100%.

3. Internal Process Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan				
5.1	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Klaster	Inventarisasi hutan nasional (IHN) merupakan bagian dari perencanaan hutan nasional, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait: jenis dan potensi tegakan hutan, jenis, potensi dan sebaran tumbuhan non kayu. IHN dilakukan pada areal hutan negara,	Data dihimpun oleh Ditjen Planologi Kehutanan, yang terdiri dari Ketua regu bisa berasal dari BPKHTL, KPH, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan atau instansi pelaksana lainnya yang memiliki kompetensi melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan nasional yang dibuktikan dengan	Desain baru IHN (disebut IHN 2.0) menggunakan metode "Stratified Systematic Sampling" atau 'Sampling Sistematis Berstrata' pada 3 kelompok hutan, yakni : 1) Hutan lahan kering, rawa, dan tanaman, 2). pepohonan Di Luar Hutan (PDLH), dan

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			hutan adat, dan hutan hak pada tingkat nasional. IHN dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun	pengalaman kerja di bidang inventarisasi hutan dan telah mengikuti pelatihan IHN 2.0.	Hutan mangrove. Unit-unit sampel (klaster) didistribusikan secara sistematis dengan kerangka sampling berupa kisi (grid) heksagonal dengan jarak/interval yang berbeda-beda pada masing-masing strata dan kelompok pulau (Sumatera, Jawa, Bali Nusa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) sesuai perhitungan ukuran sampel (jumlah klaster) yang diperlukan untuk mencapai tingkat ketelitian pendugaan populasi yang diharapkan.
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku				
6.1	Hasil verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	9 Unit	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) adalah penerimaan negara yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku	Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan oleh perusahaan yang memiliki izin	Cara penghitungan tarif PNBPN PKH diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien				
7.1	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,51 Poin	Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25	Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan.	Data diambil dari Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan. Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.		karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan				
8.1	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84,57 Poin	Evaluasi implementasi SAKIP terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.	Laporan Kinerja dan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Tim Setjen	Data diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kehutanan, selain itu beberapa hal yang dilihat diantaranya: 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja; 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4. Evaluasi terhadap kebijakan. Komponen yang dinilai, kategori predikat tingkat AKIP dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Learning and Growth

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan				
9.1	Laporan Peningkatan dan Kapasitas sumber daya manusia	1 Dokumen	Laporan Peningkatan dan Kapasitas SDM Pelatihan/Diklat/Workshop/ Bimtek yang diikuti oleh setiap pegawai adalah	Sumber data berasal sistem aplikasi pelayanan kepegawain (SAPK), pendataan ulang	Dokumen dan JPL (Jam Pelajaran Latihan) adalah satuan waktu untuk mengukur durasi

No	Sasaran dan Indikator	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			standar jumlah jam pelatihan (disebut JPL atau <i>Jam Pelajaran Latihan</i>) yang wajib dipenuhi oleh seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun, untuk mendukung pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya.	PNS (e-PUPNS), penilaian prestasi kerja PNS dan data hukuman disiplin pegawai.	pembelajaran dalam kegiatan pelatihan, diklat, workshop, atau bimbingan teknis (bimtek). Jumlah minimum JPL berarti bahwa setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/pendidikan yang total durasinya mencapai paling tidak sejumlah jam tertentu. 1 JPL umumnya setara dengan 45-60 menit belajar efektif, tergantung standar yang dipakai instansi atau lembaga pelatihan.
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel				
10.1	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen	Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan / instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan	Sumber data berasal laporan keuangan yang disusun oleh Ditjen Planologi Kehutanan	Menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
10.2	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	1 Dokumen	Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan / instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan	Sumber data berasal laporan keuangan yang disusun oleh Ditjen Planologi Kehutanan	Menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

RINCIAN TARGET KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

1. Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan					
1	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen

2. Costumer Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
2	Pelayanan verifikasi dan penataan batas PPTKH yang andal					
2.1	Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH terhadap target rencana kerja	-	-	-	100%	100%
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat					
3.1	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan					
4.1	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	100%

3. Internal Process Perspective

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan					
5.1	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	-	4 Klaster	-	-	4 Klaster
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku					
6.1	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	5 Unit	4 Unit	9 Unit
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien					
7.1	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	3,51 Poin	3,51 Poin
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan					
8.1	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	84,57 Poin	84,57 Poin

4. Learning and Growth

No	Sasaran dan Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan					
9.1	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan	25%	50%	75%	100%	1 Dokumen
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel					
10.1	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	25%	50%	75%	100%	1 Dokumen
10.2	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	25%	50%	75%	100%	1 Dokumen

SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA		Andi Setiawan, S.Hut., M.Si		
JABATAN		Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang		
UNIT KERJA		Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang		
No.	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	4 Dokumen	Penerima Layanan
2	Pelayanan verifikasi dan penataan batas PPTKH yang andal	Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH terhadap target rencana kerja	100%	Penerima Layanan
3	Penyediaan informasi geospasial kehutanan yang akurat	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen	Penerima Layanan
4	Layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	100%	Penerima Layanan
5	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Klaster	Penerima Layanan
6	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	9 Unit	Penerima Layanan
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja BPKH yang Agile, Efektif, dan Efisien	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,51 Poin	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Peningkatan akuntabilitas kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84,57 Poin	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 Dokumen	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	1 Dokumen	Penguatan Internal atau Anggaran
		Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	1 Dokumen	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi Pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan	
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab	

	– Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	– Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah – Membantu orang lain belajar – Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	– Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya – Suka menolong orang lain – Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	– Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah – Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara – Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	– Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan – Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas – Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	– Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi – Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah – Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II Palembang
PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA						
1.	38 pegawai					
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.					
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN						
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan					
	No	INDIKATOR	Q1	Q2	Q3	Q4 Y
	1	Dokumen penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	-	-	-	4 Dokumen 4 Dokumen
	2	Persentase realisasi verifikasi dan penataan batas PPTKH terhadap target rencana kerja	-	-	-	-
	3	Dokumen penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional		25 %	50%	100% 100% (1 Dokumen)
	4	Persentase layanan publik yang transparan untuk perizinan dan penggunaan kawasan diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-
	5	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	-	90%	-	100% 100% (4 Klaster)
	6	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	5 Unit	4 Unit 9 Unit
	7	Nilai SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	3,51 Poin 3,51 Poin
	8	Nilai SAKIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	-	-	-	84,57 Poin 84,57 Poin
	9	Penguatan organisasi dan SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan	25%	50%	75%	100% 1 Dokumen
	10	Penguatan pengelolaan keuangan, BMN dan Arsip Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang efektif, efisien dan akuntabel	25%	50%	75%	100% 2 Dokumen
KONSEKUENSI						
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.					
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
UNIT KERJA (693658) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG
ALOKASI Rp. 5,722,536,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen			5,722,536,000	
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan			5,722,536,000	
7314.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,722,536,000	
7314.EBA.994	Lokasi : KOTA PALEMBANG				
001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,722,536,000	U
A	Gaji dan Tunjangan			4,220,000,000	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,910,430,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.014-Palembang)			1,164,606,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	12.0 BLN	80,383,000	964,596,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS 13	1.0 BLN	100,010,000	100,010,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS THR	1.0 BLN	100,000,000	100,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.014-Palembang)			104,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.0 BLN	8,000	96,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS 13	1.0 BLN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS THR	1.0 BLN	4,000	4,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.014-Palembang)			80,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 13	1.0 BLN	10,000,000	10,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS THR	1.0 BLN	10,000,000	10,000,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.014-Palembang)			49,000,000	RM
	- Belanja tunjangan anak PNS	12.0 BLN	3,500,000	42,000,000	
	- Belanja tunjangan anak PNS 13	1.0 BLN	3,500,000	3,500,000	
	- Belanja tunjangan anak PNS THR	1.0 BLN	3,500,000	3,500,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.014-Palembang)			40,320,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	12.0 BLN	2,880,000	34,560,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS 13	1.0 BLN	2,880,000	2,880,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS THR	1.0 BLN	2,880,000	2,880,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.014-Palembang)			112,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.0 BLN	8,000,000	96,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13	1.0 BLN	8,000,000	8,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS THR	1.0 BLN	8,000,000	8,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
 UNIT ORG (03) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
 UNIT KERJA (693658) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG
 ALOKASI Rp. 5,722,536,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.014-Palembang)			8,400,000	RM
	- Belanja Tunj. Pph PNS	12.0 BLN	600,000	7,200,000	
	- Belanja Tunj. Pph PNS 13	1.0 BLN	600,000	600,000	
	- Belanja Tunj. Pph PNS THR	1.0 BLN	600,000	600,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.014-Palembang)			120,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Pph PNS	12.0 BLN	10,000,000	120,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.014-Palembang)			200,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.014-Palembang)			56,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	12.0 BLN	4,000,000	48,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS 13	1.0 BLN	4,000,000	4,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS THR	1.0 BLN	4,000,000	4,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.014-Palembang)			2,080,000,000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	2,080,000,000	2,080,000,000	
B	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan P3K</i>			309,570,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.014-Palembang)			140,000,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok P3K	12.0 BLN	10,000,000	120,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok P3K 13	1.0 BLN	10,000,000	10,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok P3K THR	1.0 BLN	10,000,000	10,000,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.014-Palembang)			14,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji P3K	12.0 BLN	1,000	12,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji P3K 13	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji P3K THR	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.014-Palembang)			3,332,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri P3K	12.0 BLN	238,000	2,856,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri P3K 13	1.0 BLN	238,000	238,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri P3K THR	1.0 BLN	238,000	238,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.014-Palembang)			1,092,000	RM
	- Belanja tunjangan anak P3K	12.0 BLN	78,000	936,000	
	- Belanja tunjangan anak P3K 13	1.0 BLN	78,000	78,000	
	- Belanja tunjangan anak P3K THR	1.0 BLN	78,000	78,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(143)

(03)

(693658)

Rp. 5,722,536,000

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.014-Palembang) - Belanja Tunjangan Fungsional P3K - Belanja Tunjangan Fungsional P3K 13 - Belanja Tunjangan Fungsional P3K THR	12.0 BLN 1.0 BLN 1.0 BLN	1,100,000 220,000 220,000	13,640,000 13,200,000 220,000 220,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.014-Palembang) - Belanja Tunj. Beras P3K	12.0 BLN	1,008,000	12,096,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.014-Palembang) - Belanja Uang Makan P3K	1.0 THN	28,800,000	28,800,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.014-Palembang) - Belanja Tunjangan Umum P3K - Belanja Tunjangan Umum P3K 13 - Belanja Tunjangan Umum P3K THR	12.0 BLN 1.0 BLN 1.0 BLN	300,000 300,000 300,000	4,200,000 3,600,000 300,000 300,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.014-Palembang) - Tunjangan Kinerja p3k	1.0 THN	106,396,000	106,396,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,502,536,000	U
A	TERSELENGGARANYA KEGIATAN PERKANTORAN			785,770,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.014-Palembang) - Belanja minum pegawai (Kopi, Teh, Air Mineral) - Tenaga Outsorcing Pengamanan (3 Org 12 Bulan) - Tenaga Outsorcing Kebersihan (4 Org 12 Bulan) - Tenaga Outsorcing Driver / Pengemudi 2 org - Tenaga Outsorcing Front Office (1 Org 12 Bulan)	1.0 THN 36.0 OB 48.0 OB 24.0 OB 12.0 OB	12,028,000 3,245,000 3,470,000 3,245,000 3,245,000	412,228,000 12,028,000 116,820,000 166,560,000 77,880,000 38,940,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.014-Palembang) - Biaya pengiriman dan pos	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
UNIT KERJA (693658) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG
ALOKASI Rp. 5,722,536,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.014-Palembang) - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm(pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran(pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar) (PPABP) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 24.0 OB	2,050,000 1,510,000 1,330,000 1,750,000 920,000 800,000 590,000 300,000 390,000 350,000 490,000	142,920,000 24,600,000 18,120,000 15,960,000 21,000,000 11,040,000 9,600,000 14,160,000 3,600,000 4,680,000 8,400,000 11,760,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.014-Palembang) Pencetakan dan dokumentasi	12.0 BLN	1,750,000	21,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.014-Palembang) Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 SATKR	60,020,000	60,020,000	RM
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.014-Palembang) - Langganan internet - Sewa Hosting Webmail BPKH dan G.drive - Langganan Teleconference BPKH	12.0 BLN 1.0 THN 1.0 THN	10,000,000 13,645,000 3,957,000	137,602,000 120,000,000 13,645,000 3,957,000	RM
B	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 dan 2			325,670,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.014-Palembang) Sewa Kendaraan Roda 4/Pick Up Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Sumatera Selatan)	12.0 BLN	14,780,000	177,360,000 177,360,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.014-Palembang) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Selatan) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Selatan) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sumatera Selatan)	2.0 UNIT 1.0 UNIT 7.0 UNIT	36,920,000 39,540,000 4,990,000	148,310,000 73,840,000 39,540,000 34,930,000	RM
C	LAYANAN DAYA DAN JASA			173,136,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
UNIT KERJA (693658) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG
ALOKASI Rp. 5,722,536,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.014-Palembang)			165,936,000	RM
	- Biaya langganan listrik	12.0 BLN	13,828,000	165,936,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.014-Palembang)			3,000,000	RM
	- Biaya langganan telepon dan faksimile	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.014-Palembang)			4,200,000	RM
	- Biaya langganan air PDAM	12.0 BLN	350,000	4,200,000	
D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR			78,600,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.014-Palembang)			78,600,000	RM
	- Pemeliharaan AC (14 Unit)	14.0 UNIT	610,000	8,540,000	
	- Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	24.0 UNIT	730,000	17,520,000	
	- Pemeliharaan printer	15.0 UNIT	690,000	10,350,000	
	- Pemeliharaan Genset (40 KVA)	1.0 UNIT	7,190,000	7,190,000	
	- Pemeliharaan plotter	2.0 UNIT	10,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan jaringan lan	1.0 PAKET	15,000,000	15,000,000	
E	PERAWATAN GEDUNG KANTOR			139,360,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.014-Palembang)			139,360,000	RM
	- Pemeliharaan Taman	1000.0 M2	11,000	11,000,000	
	- Pemeliharaan rumah dinas jabatan Kepala BPKH	120.0 M2	147,000	17,640,000	
	- Pemeliharaan rumah dinas jabatan Kepala Sub Bag Tata Usaha	70.0 M2	147,000	10,290,000	
	- Pemeliharaan rumah dinas jabatan Kasi PKH	45.0 M2	147,000	6,615,000	
	- Pemeliharaan rumah dinas jabatan Kasi ISDH	45.0 M2	147,000	6,615,000	
	- Pemeliharaan gedung kantor operasional	400.0 M2	218,000	87,200,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

PALEMBANG, 26 November 2024

ANDI SETIAWAN

NIP. 197410242000031001



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : SK. 117 /BPKH.II/TU/KUM.2.10/B/12/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
BAGIAN ANGGARAN 143
PADA SATUAN KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

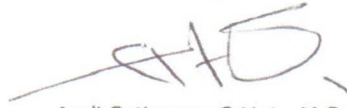
- Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, terdapat pembebanan Honorarium Pelaksana DIPA Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa pegawai nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, telah ditetapkan sebagai Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 143 Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 143 Lingkup Kementerian Kehutanan.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 143 di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ANGGARAN 143 PADA SATUAN KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG.
- KESATU : Menunjuk pejabat yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 143 pada satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 19 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



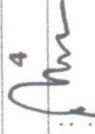
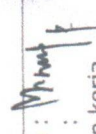
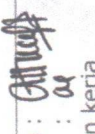
Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Kehutanan u.p. Sekretaris Jenderal, Jakarta;
2. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Berkenaan;
5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Berkenaan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran 1 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPKH Wilayah II Palembang
Nomor : SK.117/BPKH.II/TU/KUM.2.10/B/12/2024
Tanggal : 19 Desember 2024

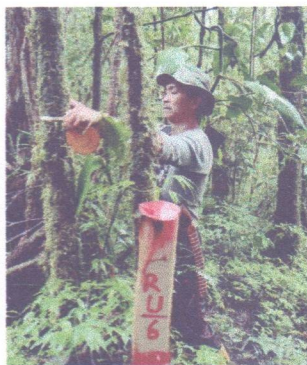
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
BAGIAN ANGGARAN 143 SATUAN KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SPEKIMEN TANDA TANGAN, PARAF, DAN STEMPSEL SATUAN KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Imam Komarudin, S.Hut., M.H. NIP. 19820818 200604 1 003	Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan BPKH Wilayah II Palembang	Tanda Tangan :  Paraf :  Stempel satuan kerja	Pejabat Pembuat Komitmen pada Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan	
2.	Eko Subagyo Widodo Putro, S.Ant., M.Sc. NIP. 19760421 200212 1 003	Kepala Seksi Sumber Daya Hutan BPKH Wilayah II Palembang	Tanda Tangan :  Paraf :  Stempel satuan kerja	Pejabat Pembuat Komitmen pada Seksi Sumber Daya Hutan dan Subbagian Tata Usaha	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang
3.	Mayorita, S.Hut., M.Si NIP. 19850303 200912 2 002	Kepala Subbagian Tata Usaha BPKH Wilayah II Palembang	Tanda Tangan :  Paraf :  Stempel satuan kerja	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar	
4.	Sri Hartati, S.Kom NIP. 19760622 200212 2 005	Bendahara BPKH Wilayah II Palembang	Tanda Tangan :  Paraf :  Stempel satuan kerja	Bendahara	

Kuasa Pengguna Anggaran,



Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA